

Penerapan standar akuntansi pemerintah akrual ini hakikatnya sudah memiliki landasan hukum yang dalam penerapannya bersifat *mandatory*, namun pada praktiknya pengguna standar akuntansi pemerintah akrual seperti pemerintah belum sepenuhnya menerapkannya. Hal tersebut disebabkan karena masih diperlukannya perbaikan birokrasi agar transparan dan akuntabel serta kesadaran penuh dari semua pihak agar pertanggungjawabannya bisa disampaikan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari faktor-faktor pelatihan, pendampingan aparatur pemerintah daerah, dan komitmen organisasi terhadap tingkat kualitas penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Penelitian ini menggunakan metode sensus dengan pengambilan sampel adalah seluruh populasi. Populasi dan sampel penelitian adalah seluruh organisasi perangkat daerah Badan Pengelolaan keuangan dan aset daerah seluruh Jawa Tengah. Jumlah sampel adalah 35 institusi yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. Data yang diperoleh diolah dengan teknik analisis yang digunakan untuk menguji hubungan antar variabel adalah regresi linier berganda dan alat analisis *statistical package for the social sciences 22.0*.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa pelatihan dan pendampingan aparatur pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kualitas penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Sedangkan hasil analisis variabel komitmen organisasi tidak menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kualitas penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual secara parsial. Tetapi secara simultan ketiga variabel tersebut terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kualitas penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Kata Kunci: tingkat kualitas penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, pelatihan, pendampingan aparatur pemerintah daerah, komitmen organisasi, regresi linier berganda dan spss 22.0.

KATA PENGANTAR